

**ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA SEKTOR INDUSTRI KECIL
DAN MENENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 1994-2013**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

FITRIA MEIRIZA FALLA
NIM. 12020110130067

**FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama Penyusun : Fitria Meiriza Falla
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130067
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1994-
2013**
Dosen Pembimbing : Nenek Woyanti S.E, M.Si

Semarang, 13 November 2014

Dosen Pembimbing

Nenek Woyanti, SE, M.Si

NIP. 19690512 199403 2003

PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Fitria Meiriza Falla
Nomor Induk Mahasiswa : 12020110130067
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Ilmu Ekonomi dan Studi
Pembangunan
Judul Skripsi : **ANALISIS PENYERAPAN TENAGA KERJA
PADA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH
DI PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 1994-
2013**

Telah dinyatakan lulus ujian pada tanggal 25 November 2014

Tim Penguji

1. Nenek Woyanti, SE, M.Si ()
2. Dra. Herniwati Retno Handayani, MS ()
3. Achma Hendra Setiawan, SE, M.Si ()

Mengetahui,

Pembantu Dekan I

Anis Chariri, SE, M.Com, Ph.D, Akt

NIP 19670809 199203 1001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Fitria Meiriza Falla, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013, adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau symbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas baik disengaja maupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi saya yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijasah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 25 November 2014
Yang membuat pernyataan,

Fitria Meiriza Falla
NIM : 12020110130067

ABSTRACT

Industrialization is one of the strategies that is undertaken by the Government to increase economic development, which one of the goals to increase employment opportunities. The development of small industries will help overcoming unemployment regarding the used technology is labor intensive-technology so that the small industries increase employment and business opportunities. Small and Medium Industries in Central Java Province in employment is likely to fluctuations and the negative growth rate in several years. This study aimed to analyze the influence of the variable business units, the value of output, the value of investment, and minimum wages to the number of workers at the Small and Medium Industries in Central Java Province.

This study uses multiple regression analysis using time series data from 1994 to 2013. The variables used in this study is the number of unit at the Small and Medium Industries in Central Java Province, the value of output at the Small and Medium Industries in Central Java Province, the value of investment at the Small and Medium Industries in Central Java Province, the value of the minimum wage and employed labor force data at the Small and Medium Industries in Central Java province. The data are secondary data sourced from the BPS Central Java. In this study also used multiple regression analysis using SPSS 17 software .

Based on data processing, it can be obtained the value of Adjusted R^2 is 0,764. It means that 76,4 percent of labor absorption at the Small and Medium Industries in Central Java can be explained by variations in the number of business units, the output value, the value of the investment, and the province's minimum wage, and the rest of 23,6 percent described by other variables outside the model. The variable of number of business units (X1) is not significant on labor absorption at the Small and Medium Industries in Central Java. The variable of value of output (X2) has negative and significant impact on labor absorption at the Small and Medium Industries in Central Java. The variable of value of investment (X3) is has positive and significant impact on labor absorption at the Small and Medium Industries in Central Java. The variable of minimum wage (X4) has negative and not significant impact on labor absorption at the Small and Medium Industries in Central Java. The results from the F test indicates that together there is a significant influence of the fourth variables.

Keywords: *Small and medium industries, labor absorption, the number of business unit, the value of output, the value of investment, the province's minimum wage.*

ABSTRAKSI

Industrialisasi merupakan salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk percepatan pembangunan ekonomi, yang salah satu tujuannya untuk meningkatkan kesempatan kerja. Pengembangan industri kecil dan menengah akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha. Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah dalam penyerapan tenaga kerja yang cenderung fluktuasi dan laju pertumbuhannya negatif di beberapa tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai produksi, dan UMP terhadap penyerapan tenaga kerja dalam Industri Kecil dan Menengah di Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda dalam bentuk *first difference* dengan menggunakan data time series tahun 1994-2013. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah unit usaha kecil dan menengah pada IKM di Provinsi Jawa Tengah, nilai investasi pada IKM di Provinsi Jawa Tengah, upah minimum provinsi (UMP) dan data tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil dan menengah (IKM) di Provinsi Jawa Tengah. Data tersebut berupa data sekunder yang bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah. Dalam penelitian ini juga menggunakan metode analisis regresi berganda dengan menggunakan *software SPSS 17*.

Berdasarkan hasil perhitungan SPSS 17 menunjukkan bahwa nilai Adjusted R^2 adalah 0,764. Hal ini menunjukkan bahwa 76,4% penyerapan tenaga kerja dapat dijelaskan oleh variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, dan UMP. Sedangkan sisanya sebesar 23,6% dipengaruhi oleh variabel lain di luar model. Variabel jumlah unit usaha (X_1) tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Jawa Tengah, variabel nilai produksi (X_2) mempunyai hubungan negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja, variabel nilai investasi (X_3) mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan variabel UMP (X_4) mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Secara bersama-sama variabel jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi dan UMP berpengaruh dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Jawa Tengah.

Kata kunci : Industri Kecil dan Menengah, penyerapan tenaga kerja, jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, UMP

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah swt atas karunia dan anugrah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Analisis Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013”. Adapun maksud dari penyusunan skripsi ini adalah guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa bimbingan, bantuan dan dorongan tersebut sangat berarti dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan hormat dan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Suharnomo, M.Si, selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro.
2. Ibu Nenek Woyanti, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan segala kemudahan, arahan, nasehat, saran dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Ibu Evi Yulia Purwanti, SE, M. Si selaku dosen wali yang dengan tulus memberikan bimbingan dan kemudahan selama penulis menjalani studi.
4. Seluruh dosen di Fakultas Ekonomika dan Bisnis khususnya jurusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada penulis

5. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomika dan Bisnis yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan.
6. Kedua orangtua dan kakak tercinta yang dengan setulus hati memberikan doa, dukungan, motivasi, dan kasih sayang kepada penulis.
7. Teman-teman IESP 2010 khususnya Melia, Risky, Roni, Danu, Candra, Anas, Bram, Tyo, Dian PS, Astri, Pipit Anggreliana, Kinanti, Anna, Riana, Adit Fairuz, Adit Emka, Dandy, Abil, Adri, Agil, Ian, Ghalib, Aang dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Semoga kita semua sukses.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu dan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi dan kuliah dari awal sampai akhir.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan dan menghargai setiap kritik dan saran yang telah membangun dari berbagai pihak demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Semarang, 25 November 2014

Penulis

Fitria Meiriza Falla

NIM 12020110130067

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAKSI	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Kegunaan	14
1.4 Sistematika Penulisan	
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu	17
2.1.1 Tenaga Kerja	17
2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja	19
2.1.3 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja	26
2.1.4 Pengertian Industri Kecil dan Menengah	28
2.1.5 Unit Usaha	30
2.1.6 Nilai Produksi	31
2.1.7 Investasi	31
2.1.8 Upah Minimum	33
2.1.9 Hubungan Antar Variabel	36
2.1.10 Penelitian Terdahulu	38
2.2 Kerangka Pemikiran Teori	40
2.3 Hipotesis	40
BAB III METODE PENELITIAN	42
3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	42
3.2 Jenis dan Sumber Data	43
3.3 Metode Pengumpulan Data	44
3.4 Metode Analisis Data	44
3.4.1 Deteksi Asumsi Klasik	46
3.4.2 Uji Statistik	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	53
4.1 Deskripsi Obyek Penelitian	53

4.1.1 Kondisi Geografis	53
4.1.2 Kondisi Demografis	53
4.1.3 Kondisi Perekonomian	54
4.1.4 Kondisi Ketenagakerjaan	56
4.1.5 Perkembangan Tenaga Kerja pada IKM	57
4.1.6 Perkembangan Jumlah Unit Usaha	58
4.1.7 Perkembangan Nilai Produksi	59
4.1.8 Perkembangan Nilai Investasi	60
4.1.9 Perkembangan UMP	61
4.2 Analisis Data	62
4.2.1 Deteksi Penyimpangan Asumsi Klasik	63
4.2.2 Analisis Regresi	65
4.3 Interpretasi Hasil	69
 BAB V PENUTUP	 73
5.1 Kesimpulan	73
5.2 Saran	74
5.3 Keterbatasan Penelitian	75
 DAFTAR PUSTAKA	 76
LAMPIRAN – LAMPIRAN	78

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Distribusi Persentase PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Indonesia Tahun 2009-2013 (Persen)	3
Tabel 1.2	Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan di Tiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah)	3
Tabel 1.3	Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Persen)	4
Tabel 1.4	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Utama di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Persen)	5
Tabel 1.5	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	5
Tabel 1.6	Perkembangan Unit Usaha, Nilai Produksi, Nilai Investasi, UMP dan Tenaga Kerja pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	9
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	38
Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Umur dan Jenis Kelamin di Jawa Tengah Tahun 2013	54
Tabel 4.2	Perkembangan Produk Domestik Regional Bruto di Jawa Tengah Tahun 2009-2013	54
Tabel 4.3	PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan di Jawa Tengah Tahun 2013	55
Tabel 4.4	Keadaan Ketenagakerjaan di Jawa Tengah Tahun 2009-2013	56
Tabel 4.5	Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha di Jawa Tengah Tahun 2013 (Persen)	57
Tabel 4.6	One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test	63
Tabel 4.7	Hasil Deteksi Multikolinearitas	64

Tabel 4.8	Hasil Uji <i>Lagrange Multiplier</i> (LM test)	65
Tabel 4.9	Hasil Uji <i>Glejser</i>	66
Tabel 4.10	Hasil Analisis Regresi	67
Tabel 4.11	Hasil Koefisien Determinasi (Uji R ²)	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Tetap dalam isokuan Produksi ...	21
Gambar 2.2	Kurva Permintaan terhadap Tenaga Kerja dalam Jangka Pendek ..	23
Gambar 2.3	Kombinasi Tenaga Kerja dan Modal dalam Jangka Panjang	25
Gambar 2.4	Model Kerangka Pemikiran	40
Gambar 4.1	Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	58
Gambar 4.2	Perkembangan Jumlah Unit Usaha pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	59
Gambar 4.3	Perkembangan Nilai Produksi pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	60
Gambar 4.4	Perkembangan Nilai Investasi pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	61
Gambar 4.5	Perkembangan UMP pada IKM di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A	Data Mentah dan Data <i>First Difference</i>	79
Lampiran B	Hasil Deteksi Asumsi Klasik	80
Lampiran C	Hasil Analisis Regresi	82

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara berkembang diarahkan untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja dan pemerataan pendapatan di setiap daerah. Salah satu indikator untuk menilai keberhasilan dari pembangunan ekonomi suatu negara adalah dilihat dari kesempatan kerja yang diciptakan dari pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi melibatkan sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan. Jumlah penduduk yang besar tidak selalu menjamin keberhasilan pembangunan bahkan dapat menjadi beban bagi keberlangsungan pembangunan tersebut. Jumlah penduduk yang terlalu besar dan tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja akan menyebabkan sebagian dari penduduk yang berada pada usia kerja tidak memperoleh pekerjaan.

Perluasan penyerapan tenaga kerja diperlukan untuk mengimbangi laju pertumbuhan penduduk usia muda yang masuk ke pasar tenaga kerja. Ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan penciptaan lapangan kerja akan menyebabkan tingginya angka pengangguran. Kemudian, meningkatnya angka pengangguran akan mengakibatkan pemborosan sumber daya dan potensi angkatan kerja yang ada, meningkatnya beban masyarakat, merupakan sumber utama kemiskinan dan mendorong terjadinya peningkatan

keresahan sosial, serta menghambat pembangunan ekonomi dalam jangka panjang (Depnakertrans, 2004).

Salah satu strategi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mempercepat pembangunan ekonomi adalah melalui industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan suatu proses interaksi antara pengembangan teknologi, inovasi, spesialisasi dalam produksi dan perdagangan antar negara yang pada akhirnya sejalan dengan peningkatan pendapatan perkapita yang mendorong perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi didalam perekonomian sering juga diartikan sebagai proses perubahan struktur ekonomi (Tambunan, 2001).

Proses industrialisasi yang dilakukan di Indonesia sejak Pelita I telah menimbulkan terjadinya transformasi struktural. Perkembangan dan pertumbuhan secara sektoral mengalami pergeseran. Awalnya sektor pertanian merupakan sektor yang mempunyai kontribusi besar. Seiring dengan berkembang pesatnya industrialisasi serta didukung kebijakan dari pemerintah dalam mempermudah masuknya modal asing ke Indonesia maka sektor manufaktur ini mengalami peningkatan sehingga mulai menggeser sektor pertanian (Kuncoro, 2007).

Kontribusi tiap sektor terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia ditunjukkan oleh Tabel 1.1. Berdasarkan Tabel 1.1, sektor industri pengolahan berkontribusi paling besar terhadap perekonomian di Indonesia. Pada tahun 2013, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 23,70 persen yang kemudian diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran 14,33 persen serta sektor pertanian sebesar 11,24 persen. Walaupun sektor industri pengolahan

mengalami penurunan tiap tahunnya, sektor ini tetap paling besar diantara sektor-sektor lainnya.

Tabel 1.1
Distribusi Persentase PDB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku Di Indonesia Tahun 2009-2013 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	15,29	15,29	14,71	14,50	14,43
2	Pertambangan dan Galian	10,56	11,16	11,82	11,80	11,24
3	Industri Pengolahan	26,36	24,8	24,34	23,97	23,70
4	Listrik, Gas, dan Air	0,83	0,76	0,75	0,76	0,77
5	Bangunan	9,90	10,25	10,16	10,26	9,99
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	13,38	13,9	13,80	13,96	14,33
7	Pengangkutan dan Komunikasi	6,31	6,56	6,62	6,67	7,01
8	Keuangan	7,23	7,24	7,21	7,27	7,52
9	Jasa-jasa	10,24	10,24	10,58	10,81	11,02
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Indonesia Tahun 2009-2013, diolah

Perkembangan PDRB sektor industri di tiap provinsi di Pulau Jawa ditunjukkan oleh Tabel 1.2. Berdasarkan Tabel 1.2, laju pertumbuhan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah merupakan terbesar pada tahun 2013 dibandingkan dengan provinsi lainnya yaitu sebesar 5,91 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah lebih baik daripada provinsi-provinsi lain.

Tabel 1.2
Perkembangan PDRB Sektor Industri Pengolahan Atas Dasar Harga Konstan di Tiap Provinsi di Pulau Jawa Tahun 2011-2013 (Milyar Rupiah)

No	Provinsi	2011	r (%)	2012	r (%)	2013	r (%)
1	Banten	47.034,18	4,73	48.517,64	3,15	50.417,71	3,91
2	DKI Jakarta	62.095,76	2,54	63.591,05	2,41	65.134,28	2,43
3	Jawa Barat	144.010,05	6,21	149.677,17	3,94	157.643,08	5,32
4	Jawa Tengah	65.439,44	6,60	69.012,50	5,46	73.092,38	5,91
5	DI Yogyakarta	2.983,17	6,79	2.916.722	-2,26	-	-
6	Jawa Timur	92.171,19	6,10	98.017,06	6,34	103.497,23	5,59

Sumber : BPS Indonesia Tahun 2011-2013, diolah

Sektor industri diyakini dapat sebagai sektor yang dapat memimpin sektor-sektor lain dalam sebuah perekonomian menuju kemajuan. Produk-produk industrial selalu memiliki “dasar tukar” (*term of trade*) yang tinggi atau lebih menguntungkan serta menciptakan nilai tambah yang besar dibanding produk-produk sektor lain (Dumairy, 1996). Sejalan dengan hal tersebut, maka peran sektor industri semakin penting sehingga dapat dijadikan sebagai prioritas pembangunan yang memiliki peranan sebagai sektor pemimpin bagi pembangunan sektor-sektor lainnya. Keadaan tersebut juga berlaku di Jawa Tengah. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) seperti terlihat dalam Tabel 1.3.

Tabel 1.3
Distribusi Persentase PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	19,94	19,49	19,06	18,74	18,3
2	Pertambangan dan Galian	0,97	0,97	0,95	0,94	0,96
3	Industri Pengolahan	32,76	32,87	33,25	32,83	32,56
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	1,03	1,04	1,02	1,02	1,06
5	Konstruksi	6,14	6,10	5,99	5,99	5,96
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	19,67	19,56	19,74	2,29	20,73
7	Pengangkutan dan Komunikasi	5,99	5,91	5,85	5,92	6,03
8	Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	3,63	3,58	3,55	3,59	3,73
9	Jasa-jasa	9,86	10,48	10,59	10,67	10,67
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui pertumbuhan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah cenderung berfluktuasi, di mana pada tahun 2011 berkontribusi sebesar 33,25 persen meningkat menjadi sebesar 32,83 persen pada tahun 2012 tetapi menurun menjadi

sebesar 32,56 persen pada tahun 2013. Walaupun mengalami penurunan pada tahun 2013, kontribusi sektor industri pengolahan di Jawa Tengah tetap yang paling besar dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Struktur ekonomi suatu daerah pada umumnya dapat dilihat dari komposisi produk regional menurut sektor-sektor perekonomian. Banyaknya tenaga kerja yang terserap oleh suatu sektor perekonomian, dapat digunakan untuk menggambarkan daya serap sektor perekonomian tersebut terhadap angkatan kerja. Dengan demikian proporsi pekerja menurut lapangan pekerjaan merupakan salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja (Sitanggang dan Nachrowi, 2004). Tabel 1.4 menunjukkan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.4
Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas yang Bekerja Menurut Lapangan Utama di Povinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013 (Persen)

No	Lapangan Usaha	2009	2010	2011	2012	2013
1	Pertanian	37,04	35,53	33,78	31,39	30,86
2	Pertambangan dan Galian, Listrik, Gas dan Air Bersih	0,93	0,86	0,68	0,73	0,55
3	Industri Pengolahan	16,78	17,81	19,14	20,44	19,07
4	Konstruksi	6,49	6,62	6,89	7,48	5,95
5	Perdagangan	21,86	21,43	21,38	21,37	22,46
6	Transportasi	4,32	4,20	3,54	3,40	3,78
7	Keuangan	0,98	1,14	1,66	1,75	1,97
8	Jasa	11,60	12,41	12,92	13,44	15,36
Total		100	100	100	100	100

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2013, diolah

Berdasarkan Tabel 1.4, sektor industri pengolahan yang berkontribusi paling besar terhadap perekonomian Provinsi Jawa Tengah hanya dapat menyerap

19,07 persen tenaga kerja pada tahun 2013. Sektor yang menyerap tenaga kerja paling tinggi adalah sektor pertanian yaitu sebesar 30,86 persen pada tahun 2013 diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran sebesar 22,46 persen. Jadi, hal ini menunjukkan bahwa penyerapan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan di Provinsi Jawa Tengah masih rendah.

Sektor industri dibedakan menjadi industri besar dan sedang serta industri kecil dan rumah tangga. Definisi yang digunakan BPS, industri besar adalah perusahaan yang mempunyai tenaga kerja 100 orang atau lebih, industri sedang adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5 orang sampai dengan 19 orang, dan industri rumah tangga adalah perusahaan dengan tenaga kerja 1 orang sampai dengan 4 orang.

Pemberdayaan industri kecil dan menengah merupakan salah satu prioritas pengembangan ekonomi kerakyatan, karena merupakan wujud kehidupan sebagian rakyat Indonesia pasca krisis dan mampu mempertahankan kelangsungan usahanya dibanding industri besar. Industri kecil dan menengah tahan terhadap krisis ekonomi dunia karena tidak bergantung pada pembiayaan yang bersumber dari luar negeri, tidak banyak kredit yang bermasalah dengan perbankan, menggunakan input lokal dan berorientasi pada ekspor. Pengembangan industri kecil dan menengah akan membantu mengatasi masalah pengangguran mengingat teknologi yang digunakan adalah teknologi padat karya sehingga bisa memperbesar lapangan kerja dan kesempatan usaha. Tabel 1.5 menunjukkan perkembangan jumlah tenaga kerja di sektor industri besar serta

industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 sampai tahun 2013.

Tabel 1.5
Perkembangan Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan IKM
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013

Tahun	Industri Besar		Industri Kecil dan Menengah	
	Jumlah (Orang)	r (%)	Jumlah (Orang)	r (%)
1994	228.213	-	2.437.004	-
1995	233.465	2,31	2.463.476	1,09
1996	234.186	0,31	2.491.687	1,15
1997	255.758	9,21	2.512.058	0,82
1998	242.791	-5,07	2.506.265	-0,23
1999	250.760	3,28	2.526.977	0,83
2000	317.245	26,51	2.541.422	0,57
2001	558.946	76,19	2.558.221	0,66
2002	558.946	0	2.558.221	0
2003	566.946	1,43	2.569.821	0,45
2004	566.967	0,01	2.631.187	2,39
2005	579.171	2,15	2.636.478	0,20
2006	585.214	1,04	2.672.813	1,38
2007	585.214	0	2.702.254	1,10
2008	592.370	1,22	2.735.299	1,22
2009	598.752	1,08	2.764.766	1,08
2010	583.222	-2,59	2.672.448	-3,34
2011	609.280	4,47	1.933.200	-27,66
2012	615.137	0,96	2.853.199	47,59
2013	644.168	4,72	2.887.510	1,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013, diolah

Berdasarkan Tabel 1.5, perusahaan industri besar di Jawa Tengah pada tahun 2013 menyerap tenaga kerja sebesar 644.168 orang. Sedangkan, perusahaan industri kecil dan menengah pada tahun 2013 dapat menyerap tenaga kerja jauh lebih besar yaitu sebesar 2.887.510 orang. Kondisi ini menggambarkan bahwa keberadaan industri kecil dan menengah berperan penting dalam perekonomian di Jawa Tengah dan menjadi salah satu sub sektor yang dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Menurut Squire (1992), jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula. Perkembangan unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, UMP dan tenaga kerja di sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah tahun 1994 sampai tahun 2013 ditunjukkan pada Tabel 1.6.

Berdasarkan Tabel 1.6, terlihat bahwa jumlah industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 1994 sampai dengan tahun 2013 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2008, jumlah unit usaha industri kecil dan menengah mengalami penurunan sebesar 0,03 persen dari tahun sebelumnya. Begitu pula pada tahun 2009, jumlah unit usaha juga mengalami penurunan sebesar 0,04 persen.

Jika dilihat dari penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah, pada tahun 2010 dan tahun 2011 peningkatan jumlah unit usaha justru tidak diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja. Tingkat tenaga kerja menurun sebesar 3,34 persen dan 27,66 persen. Laju pertumbuhan jumlah industri kecil dan menengah yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan tenaga kerja yang bekerja pada industri kecil dan menengah di Jawa Tengah ini menunjukkan bahwa jumlah unit usaha masih rendah dalam menyerap tenaga kerja.

Tabel 1.6
Perkembangan Unit Usaha, Nilai Produksi, Nilai Investasi, UMP dan Tenaga Kerja pada IKM
di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013

Tahun	Jumlah Usaha		Nilai Produksi		Nilai Investasi		UMP		Tenaga Kerja	
	Jumlah (unit)	r (%)	Jumlah (Juta Rupiah)	r (%)	Jumlah (Juta Rupiah)	r (%)	Jumlah (Rupiah)	r (%)	Jumlah (orang)	r (%)
1994	623.297	-	4.107.170	-	780.877	-	81.000	-	2.437.004	-
1995	629.025	0,92	4.524.698	10,17	827.090	5,92	90.000	11,11	2.463.476	1,09
1996	634.017	0,79	4.854.085	7,30	887.174	7,27	102.000	13,33	2.491.687	1,15
1997	638.559	0,72	5.129.185	5,67	918.944	3,59	113.000	10,78	2.512.058	0,82
1998	639.047	0,08	5.108.845	-0,40	959.625	4,43	130.000	15,04	2.506.265	-0,23
1999	640.426	0,22	5.125.491	0,33	1.007.363	4,97	153.000	17,69	2.526.977	0,83
2000	641.581	0,18	5.222.817	1,89	1.077.540	6,97	185.000	20,92	2.541.422	0,57
2001	643.504	0,29	5.290.045	1,29	1.133.933	5,23	245.000	32,43	2.558.221	0,66
2002	643.529	0,01	5.240.045	-0,95	1.133.903	-0,01	314.500	28,37	2.558.221	0
2003	643.659	0,02	5.264.810	0,47	1.193.664	5,27	342.500	8,90	2.569.821	0,45
2004	643.712	0,01	5.273.517	0,17	1.207.559	1,16	365.000	6,57	2.631.187	2,39
2005	643.953	0,04	5.350.167	1,45	1.374.872	13,85	390.000	6,85	2.636.478	0,20
2006	644.020	0,01	5.417.984	1,27	1.408.153	2,42	450.000	15,38	2.672.813	1,38
2007	644.138	0,02	5.463.405	0,83	1.486.512	5,56	500.000	11,11	2.702.254	1,10
2008	643.925	-0,03	5.509.216	0,84	1.504.281	1,19	547.000	9,40	2.735.299	1,22
2009	643.680	-0,04	5.543.170	0,62	1.518.257	0,93	575.000	5,12	2.764.766	1,08
2010	644.101	0,07	5.420.239	-2,22	1.427.089	-6,01	660.000	14,78	2.672.448	-3,34
2011	644.334	0,04	6.300.000	16,23	1.911.164	33,92	717.000	8,64	1.933.200	-27,66
2012	645.005	0,10	9.297.534	47,58	9.108.864	376,61	765.000	6,69	2.853.199	47,59
2013	645.148	0,02	7.591.868	-18,35	7.591.868	-16,65	830.000	8,50	2.887.510	1,20

Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 1994-2013, diolah

Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung kepada tinggi rendahnya permintaan oleh konsumen. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut (Simanjuntak, 2001). Namun, teori Simanjuntak tersebut tidak sesuai terhadap kenyataan yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan Tabel 1.6, kenaikan nilai produksi industri kecil dan menengah sebesar 16,23 persen pada tahun 2011 tidak diikuti dengan kenaikan penyerapan tenaga kerja. Tingkat tenaga kerja justru menurun sebesar 27,66 persen.

Pengembangan sektor industri memerlukan adanya investasi yang memadai agar dapat berjalan sesuai tujuan. Usaha akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja (Sudarsono, 1998). Investasi sangat berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan pendapatan. Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja.

Berdasarkan Tabel 1.6, nilai investasi industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan pada tahun 2011 sebesar 33,92 persen tidak diikuti oleh kenaikan penyerapan tenaga kerja. Tingkat tenaga kerja justru menurun sebesar 27,66 persen. Hal ini tidak sesuai dengan pendapat Suparmoko

(1994), bahwa semakin besar nilai investasi yang dilakukan maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja.

Menurut Handoko (dikutip dari Zamrowi, 2007), faktor lain yang mempengaruhi penyerapan tenaga kerja adalah tingkat upah. Selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja. Pemberian upah minimum yang layak diharapkan pekerja dapat memenuhi kebutuhan gizinya, sehingga dapat meningkatkan produktivitas, tetapi bila ditinjau dari teori ekonomi klasik dan neoklasik bahwa penetapan upah minimum bukan dianggap kebijakan yang tepat. Menurut teori ini, pasar tenaga kerja sama saja dengan pasar lainnya yang membutuhkan keseimbangan permintaan dan penawaran. Bila upah minimum berada di atas upah riil maka akan terdapat surplus tenaga kerja. Dengan kata lain, dalam teori ini penetapan upah minimum pada dasarnya adalah investasi terhadap mekanisme pasar, dan setiap investasi terhadap mekanisme pasar akan menyebabkan ketidakefisienan.

Upah mempunyai pengaruh terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Jika semakin tinggi tingkat upah yang ditentukan, maka sangat berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi. Akibatnya, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja sebagai tindakan efisiensi, yang berakibat pada rendahnya jumlah angkatan kerja yang bekerja. Sehingga diduga tingkat upah mempunyai pengaruh yang negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja (Simanjuntak, 2001).

Berdasarkan Tabel 1.6, dapat di lihat bahwa UMP selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Kenaikan tersebut tak lepas dari upaya perbaikan ekonomi pekerja. Selain itu kenaikan juga dikaitkan dengan perubahan kurs rupiah. Kenaikan UMP terbesar terjadi pada tahun 2001 yaitu sebesar 32,43 persen dengan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 0,66 persen. Pada tahun 2012, kenaikan UMP yang hanya sebesar 6,69 persen justru meningkatkan jumlah tenaga kerja yang terserap sebesar 47,59 persen.

Menurut Sudarsono (1998), bahwa dengan terciptanya kesempatan kerja dan adanya peningkatan produktivitas sektor-sektor kegiatan yang semakin meluas akan menambah pendapatan, mengurangi jumlah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan bagi banyak penduduk. Hal tersebut mencerminkan bahwa persoalan perluasan kesempatan kerja merupakan isu penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia termasuk di Provinsi Jawa Tengah sehingga perlu diungkapkan banyaknya tenaga kerja yang mampu terserap dalam kegiatan-kegiatan ekonomi. Hal ini berarti tergantung pada tersedianya kesempatan kerja yang diakibatkan oleh pertumbuhan ekonomi serta penanaman modal baik swasta maupun pemerintah.

Kesempatan kerja sendiri merupakan kesediaan usaha produksi dalam mempekerjakan tenaga kerja yang dibutuhkan dalam proses produksi dengan demikian mencerminkan daya serap usaha produksi tersebut. Jadi kesempatan kerja merupakan tempat untuk masyarakat dalam mendapatkan pekerjaan. Dengan melihat latar belakang tersebut, maka penelitian ini menekankan pada pengaruh

jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai produksi dan upah terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

1.2 Rumusan Masalah

Sektor industri pengolahan memiliki kontribusi paling besar bagi perekonomian di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan sektor-sektor lainnya selama tahun 2009 sampai tahun 2013 (Tabel 1.3). Namun hal ini tidak diimbangi dengan peranannya terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor industri pengolahan hanya ada di posisi ketiga dalam hal penyerapan tenaga kerja di bawah sektor pertanian serta sektor perdagangan, hotel, dan restoran (Tabel 1.4).

Sektor industri kecil dan menengah yang merupakan sub sektor industri pengolahan berperan penting dalam pasar tenaga kerja karena mampu menyerap tenaga kerja lebih besar daripada industri besar (Tabel 1.5). Pada tahun 2013, industri besar di Provinsi Jawa Tengah menyerap tenaga kerja sebesar 644.168 orang atau 18,24 persen. Sedangkan, industri kecil dan menengah menyerap tenaga kerja sebesar 2.887.510 orang atau 87,76 persen dari total jumlah tenaga kerja pada sektor industri pengolahan.

Masalah yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah adalah dalam penyerapan tenaga kerja yang pada kenyataannya cenderung fluktuatif bahkan laju pertumbuhannya negatif pada tahun 2010 yaitu sebesar 3,34 persen dan tahun 2011 sebesar 27,66 persen (Tabel 1.5). Semakin tinggi jumlah unit usaha, nilai produksi, dan nilai investasi mestinya semakin tinggi pula tenaga kerja yang terserap. Namun pada kenyataannya, peningkatan jumlah unit usaha

masih belum mampu menyerap tenaga kerja lebih besar. Seperti pada tahun 2010 dan 2011, kenaikan jumlah unit usaha justru mengakibatkan penurunan jumlah tenaga kerja (Tabel 1.6). Kenaikan nilai produksi pada tahun 2011 justru tenaga kerja mengalami penurunan (Tabel 1.6). Nilai investasi yang meningkat pada tahun 2011 juga tidak diikuti dengan kenaikan jumlah tenaga kerja (Tabel 1.6). Upah diduga memiliki pengaruh yang negatif terhadap jumlah angkatan kerja yang bekerja. Namun, kenaikan UMP tiap tahunnya justru mengakibatkan peningkatan penyerapan tenaga kerja (Tabel 1.6). Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, dapat diajukan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah?
2. Bagaimana pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah?
3. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah?
4. Bagaimana pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

3. Menganalisis pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Menganalisis pengaruh UMP terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Sebagai informasi mengenai penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah khususnya industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Sebagai bahan referensi bagi peneliti lain yang melaksanakan penelitian serupa.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan uraian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Menyajikan tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan uraian tentang variabel penelitian ini dari definisi operasional variabel, penentuan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdiri dari deskripsi obyek penelitian, analisis data dan pembahasan masalah penelitian.

BAB V PENUTUP

Terdiri dari kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini dan saran-saran bagi pihak-pihak terkait dalam masalah penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

Pengembangan industri kecil dan menengah merupakan bagian integral dari pembangunan industri dan ekonomi nasional serta memiliki peranan yang sangat strategis karena mengemban misi yang penting yaitu menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan berusaha melestarikan seni budaya, modernisasi masyarakat desa, memperkuat struktur industri dan meningkatkan ekspor nasional. Mengingat pentingnya peranan industri kecil dan menengah tersebut maka pemerintah senantiasa mengupayakan pembinaannya dan pengembangannya melalui berbagai kebijakan pembangunan yang bertujuan agar industri kecil dan menengah mampu mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan berkembang ke arah yang lebih maju dan mandiri.

2.1.1 Tenaga Kerja

Menurut Badan Pusat Statistik, Tenaga Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun atau lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan yang sedang mencari pekerjaan. Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan kerja guna menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sedangkan menurut Simanjuntak (2001), tenaga kerja adalah penduduk yang

sudah bekerja atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan kegiatan lain seperti bersekolah dan mengurus rumah tangga.

Pengertian tenaga kerja dan bukan tenaga kerja dibedakan hanya oleh batas umur. Pada awalnya batasan umur penggolongan tenaga kerja di Indonesia sejak tahun 1971 adalah bilamana seseorang sudah berumur 10 tahun atau lebih. Pemilihan batasan umur ini berdasarkan kenyataan bahwa dalam umur tersebut sudah banyak penduduk bekerja atau mencari pekerjaan. Dengan bertambahnya kegiatan pendidikan dan penetapan kebijakan wajib belajar 9 tahun, maka jumlah penduduk dalam usia sekolah yang bekerja berkurang. Oleh karena itu, semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja Nasional) tahun 2001, batas umur penggolongan kerja yang semula 10 tahun atau lebih diubah menjadi 15 tahun atau lebih. Indonesia tidak menggunakan batas umur maksimum dalam pengelompokan usia kerja karena belum mempunyai jaminan sosial nasional. Hanya sebagian kecil penduduk Indonesia yang menerima tunjangan di hari tua, yaitu pegawai negeri dan sebagian kecil pegawai perusahaan swasta (Simanjuntak, 2001).

Tenaga kerja dibagi dalam dua kelompok yaitu angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang terlibat atau berusaha untuk terlibat dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa. Angkatan kerja terdiri dari golongan bekerja serta golongan menganggur dan mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja adalah penduduk dalam usia kerja yang tidak bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan sedang tidak mencari pekerjaan. Bukan angkatan kerja terdiri dari golongan yang bersekolah, golongan

yang mengurus rumah tangga dan golongan lain-lain atau penerima pendapatan. Ketiga golongan dalam kelompok ini sewaktu-waktu dapat menawarkan jasanya untuk bekerja. Oleh sebab itu, kelompok ini sering juga dinamakan sebagai angkatan kerja potensial (Simanjuntak, 2001).

2.1.2 Permintaan Tenaga Kerja

Permintaan tenaga kerja berarti hubungan antara tingkat upah dan jumlah tenaga kerja yang dikehendaki oleh pengusaha untuk dipekerjakan. Hal ini berbeda dengan permintaan konsumen terhadap barang dan jasa. Orang membeli barang dan jasa karena barang itu memberikan nikmat (*utility*) kepada si pembeli sementara pengusaha mempekerjakan seseorang karena untuk membantu memproduksi barang atau jasa untuk dijual kepada konsumen. Oleh karena itu kenaikan permintaan pengusaha terhadap tenaga kerja tergantung dari kenaikan permintaan konsumen akan barang yang diproduksi. Permintaan tenaga kerja seperti itu disebut *derived demand* atau permintaan turunan (Simanjuntak, 2001)

Permintaan tenaga kerja berkaitan dengan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan atau instansi tertentu. Biasanya permintaan akan tenaga kerja ini dipengaruhi oleh perubahan tingkat upah dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi permintaan hasil (Sumarsono, 2003). Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh :

1. Perubahan tingkat upah

Perubahan tingkat upah akan mempengaruhi tinggi rendahnya biaya produksi perusahaan. Apabila digunakan asumsi tingkat upah naik maka akan terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a. Naiknya tingkat upah akan menaikkan biaya produksi perusahaan selanjutnya akan meningkatkan pula harga per unit produksi. Biasanya para konsumen akan memberikan respon yang cepat apabila terjadi kenaikan harga barang, yaitu mengurangi konsumsi atau bahkan tidak membeli sama sekali. Akibatnya banyak hasil produksi yang tidak terjual dan terpaksa produsen mengurangi jumlah produksinya. Turunnya target produksi mengakibatkan berkurangnya tenaga kerja yang dibutuhkan. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena pengaruh turunnya skala produksi disebut dengan efek skala produksi atau *scale effect*.
- b. Pengusaha lebih suka menggunakan teknologi padat modal untuk proses produksinya dan menggantikan tenaga kerja dengan barang-barang modal seperti mesin dan lain-lain. Kondisi seperti ini terjadi apabila upah naik dengan asumsi harga barang-barang modal lainnya tetap. Penurunan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan karena adanya penggantian atau penambahan penggunaan mesin-mesin disebut efek substitusi tenaga kerja.

Baik efek skala produksi maupun efek substitusi akan menghasilkan suatu bentuk kurva permintaan tenaga kerja yang mempunyai slope negatif.

2. Perubahan permintaan hasil akhir produksi oleh konsumen

Apabila permintaan akan hasil produksi perusahaan meningkat, perusahaan cenderung untuk menambah kapasitas produksinya, untuk maksud tersebut perusahaan akan menambah penggunaan tenaga kerjanya.

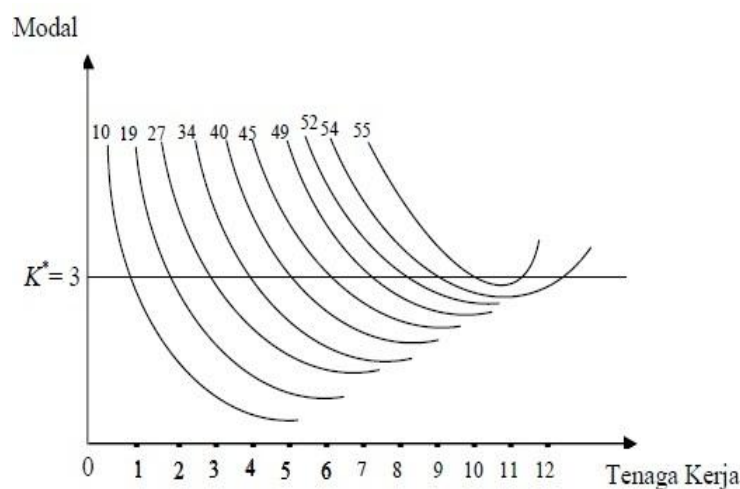
3. Harga barang modal turun

Apabila harga barang modal turun maka biaya produksi turun dan tentunya mengakibatkan harga jual barang per unit ikut turun. Pada keadaan ini perusahaan akan cenderung meningkatkan produksinya karena permintaan hasil produksi bertambah besar, akibatnya permintaan tenaga kerja meningkat pula.

2.1.2.1 Permintaan Tenaga Kerja Jangka Pendek

Fungsi produksi memperlihatkan hubungan yang terjadi antara berbagai input faktor produksi dan output perusahaan. Dengan teknologi tertentu, semakin banyak input pekerja dan modal yang digunakan semakin besar output yang dihasilkan (Ananta, 1990).

Gambar 2.1
Jumlah Tenaga Kerja dan Modal Tetap dalam Isokuan Produksi



Sumber : Ananta, 1990

Gambar 2.1 menjelaskan apabila perusahaan memiliki 3 unit modal dan jumlah tenaga kerja terus ditambah, maka akan terjadi penambahan pada output

keseluruhan. Output keseluruhan apabila 1 unit tenaga kerja yang digunakan adalah 10. Apabila 2 unit tenaga kerja digunakan, maka output keseluruhan akan meningkat menjadi 19 dan demikian seterusnya. Tambahan output yang diperoleh sehubungan dengan penambahan seorang pekerja disebut dengan tambahan hasil marginal atau *marginal physical product* (MPP_L).

Dalam memperkirakan berapa tenaga kerja yang perlu ditambah, perusahaan akan melihat tambahan hasil marginal atau *marginal physical product* dari penambahan seorang karyawan tersebut (MPP_L). Selanjutnya, perusahaan akan menghitung jumlah uang yang akan diperoleh dengan adanya tambahan hasil marginal. Jumlah uang ini dinamakan penerimaan marginal atau *marginal revenue*, yaitu nilai dari MPP_L (VMPP_L). Jadi MR sama dengan VMPP_L, yaitu besarnya MPP_L dikalikan dengan harga per unit (P) (Simanjuntak, 2001).

$$MR = VMPP_L = MPP_L \times P \dots\dots\dots (2.1)$$

MR : penerimaan marjinal

VMPP_L : nilai pertambahan asil marginal dari karyawan

MPP_L : tambahan hasil marjnal dari karyawan

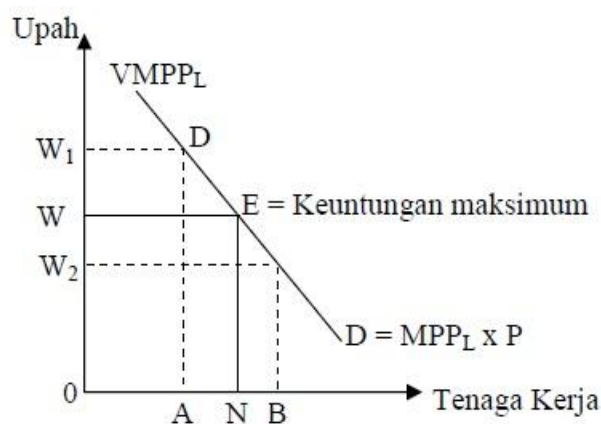
P : harga jual barang yang diproduksi per unit

Jumlah biaya yang dikeluarkan pengusaha sehubungan dengan mempekerjakan tambahan seorang karyawan adalah upahnya sendiri (W) dan dinamakan biaya marginal atau *marginal cost* (MC). Bila tambahan penerimaan marginal (MR) lebih besar dari biaya mempekerjakan orang yang menghasilkan (W), maka mempekerjakan tambahan orang tersebut akan menambah keuntungan

pengusaha. Dengan kata lain dalam rangka menambah keuntungan, pengusaha senantiasa akan terus menambah jumlah karyawan selama MR lebih besar dari W.

Apabila tenaga kerja yang terus ditambah sedangkan alat-alat dan faktor produksi lain jumlahnya tetap, maka perbandingan alat-alat produksi untuk setiap pekerja menjadi lebih kecil dan tambahan hasil marginal menjadi lebih kecil pula. Dengan kata lain, semakin bertambah tenaga kerja yang dipekerjakan, semakin kecil MPP_L dan $VMPP_L$ -nya. Hal ini karena berlakunya *law of diminishing return* dan dilukiskan dengan garis DD dalam Gambar 2.2.

Gambar 2.2
Kurva Permintaan terhadap Tenaga Kerja dalam Jangka Pendek



Sumber : Ananta, 1990

Kurva permintaan pada Gambar 2.2 dapat berbeda untuk setiap perusahaan, tergantung dari tingkat produktivitas masing-masing faktor dan efisiensi di tiap-tiap perusahaan. Garis DD menggambarkan besarnya nilai hasil marginal pekerja ($VMPP_L$) untuk setiap tenaga kerja. Bila jumlah pekerja yang dipekerjakan sebanyak $0A = 100$ orang, maka $VMPP_L$ -nya sama dengan $MPP_L \times P = W_1$. Nilai

ini lebih besar dari tingkat upah yang sedang berlaku (W). Oleh sebab itu, laba perusahaan akan bertambah dengan menambah tenaga kerja baru.

Pengusaha dapat terus menambah laba perusahaan dengan mempekerjakan orang hingga ON . Di titik N pengusaha mencapai laba maksimum dan $VMPP_L$ sama dengan upah yang dibayarkan kepada tenaga kerja.

Penambahan tenaga kerja yang lebih besar dari ON (misal OB) akan mengurangi keuntungan perusahaan. Perusahaan akan membayar upah dalam tingkat yang berlaku (W). Padahal $VMPP_L$ yang diperoleh hanya sebesar W_2 yang lebih kecil dari W . Jadi pengusaha cenderung untuk menghindari penambahan jumlah pekerja lebih besar dari ON . Penambahan pekerja lebih besar dari ON dapat dilaksanakan hanya bila pengusaha yang bersangkutan dapat membayar upah di bawah (W) atau perusahaan mampu menaikkan harga jual barang.

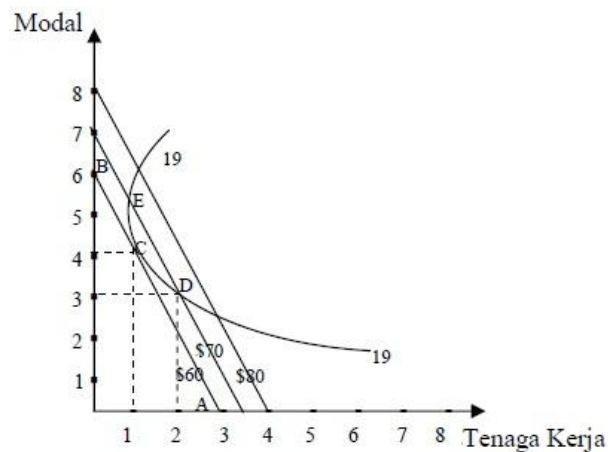
2.1.2.2 Permintaan Tenaga Kerja Jangka Panjang

Perbedaan antara permintaan terhadap tenaga kerja dalam jangka pendek dan jangka panjang adalah dalam jangka panjang semua input produksi dapat berubah. Dalam jangka pendek, yang bisa berubah hanya input yang menjadi fokus pembahasan. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat memilih berbagai bentuk kombinasi modal dan tenaga kerja dalam menghasilkan output yang mengandung biaya paling rendah.

Gambar 2.3 menunjukkan kombinasi tenaga kerja dan modal yang memberikan biaya paling rendah. Diasumsikan anggaran pengeluaran perusahaan adalah \$60, harga sewa 1 unit modal adalah \$10 per hari dan tingkat upah adalah

\$20 per hari kerja. Apabila seluruh jumlah uang digunakan untuk tenaga kerja, maka perusahaan dapat membeli 3 unit tenaga kerja. Jika seluruh jumlah uang digunakan untuk modal, maka 6 unit modal dapat dibeli.

Gambar 2.3
Kombinasi Tenaga Kerja dan Modal dalam Jangka Panjang



Sumber : Ananta, 1990

Dimisalkan perusahaan akan menghasilkan 19 ton batu bara, maka output sebesar itu dapat dihasilkan dengan satu unit tenaga kerja yang dikombinasikan dengan empat unit modal. Perusahaan juga dapat mengkombinasikan dua unit tenaga kerja dengan tiga unit modal untuk menghasilkan output sebesar 19 ton.

Perusahaan akan menemukan satu kombinasi modal dan tenaga kerja yang paling rendah biayanya, yaitu kombinasi yang diberikan oleh garis *isocost* atau *budget line* yang menyinggung isokuan sebesar 19 ton. Kombinasi yang paling rendah biayanya dalam Gambar 2.3 adalah kombinasi C, terdiri dari satu unit tenaga kerja dan empat unit modal dengan biaya keseluruhan \$60. Output sebesar 19 ton dapat dihasilkan oleh kombinasi yang diberikan pada setiap titik pada

isoquant (misal titik D dan E), akan tetapi kedua kombinasi ini memerlukan biaya \$70, sehingga ini bukanlah merupakan kombinasi yang memberikan biaya minimum. Dengan demikian perusahaan akan memilih kombinasi yang optimal antara penggunaan modal dengan tenaga kerja dengan biaya terendah sesuai dengan *budget line* yang dimiliki.

2.1.3 Elastisitas Permintaan Tenaga Kerja

Menurut Simanjuntak (2001), elastisitas tenaga kerja didefinisikan sebagai persentasi perubahan permintaan akan tenaga kerja sehubungan dengan perubahan satu persen pada tingkat upah. Secara umum dituliskan dalam persamaan :

$$e = \frac{\Delta N/N}{\Delta W/W} \dots\dots\dots (2.1)$$

Dimana :

e : elastisitas permintaan akan tenaga kerja

ΔN : perubahan jumlah tenaga kerja yang terjadi

N : jumlah yang bekerja mula-mula

ΔW : besarnya perubahan tingkat upah

W : tingkat upah yang berlaku

Rumus (2.1) dapat ditulis dalam bentuk :

$$e = \frac{\Delta N}{\Delta W} \cdot \frac{W}{N} \dots\dots\dots (2.2)$$

Atau dalam bentuk diferensial :

$$e = \frac{dN}{dW} \cdot \frac{W}{N} \dots\dots\dots (2.3)$$

Bila tingkat upah naik, jumlah orang yang dipekerjakan menurun, begitu pula sebaliknya. Jadi $\Delta N/\Delta W$ adalah negatif.

Besar kecilnya elastisitas permintaan tergantung dari empat faktor, yaitu :

1. Kemungkinan substitusi tenaga kerja dengan faktor produksi yang lain, misalnya modal. Semakin kecil kemungkinan mensubstitusikan modal terhadap tenaga kerja, semakin kecil elastisitas permintaan akan tenaga kerja.
2. Elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan. Semakin besar elastisitas permintaan terhadap barang hasil produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.
3. Proporsi biaya karyawan terhadap seluruh biaya produksi. Elastisitas permintaan akan tenaga kerja relatif tinggi bila proporsi biaya karyawan (*labor cost*) terhadap biaya produksi keseluruhan (*total cost*) juga besar.
4. Elastisitas persediaan dari faktor produksi pelengkap lainnya. Semakin besar elastisitas penyediaan faktor pelengkap dalam produksi, semakin besar elastisitas permintaan akan tenaga kerja.

Dalam jangka pendek, perusahaan tidak dapat dengan mudah mengurangi atau menambah jumlah tenaga kerja sebagai akibat dari perubahan dalam tingkat upah, karena hal tersebut memerlukan penyesuaian dalam bidang-bidang lain seperti penggunaan modal, bahan mentah, tata ruang dan prosedur. Sebaliknya dalam jangka panjang, penyesuaian dan perubahan dapat dilakukan secara berangsur-angsur. Oleh sebab itu, elastisitas permintaan akan tenaga kerja selalu lebih besar dalam jangka pendek daripada dalam jangka panjang.

2.1.4 Pengertian Industri Kecil dan Menengah

Industri kecil adalah kegiatan industri yang dikerjakan di rumah-rumah penduduk yang pekerjaannya merupakan anggota keluarga sendiri yang tidak terikat jam kerja dan tempat. Industri kecil dapat juga diartikan sebagai usaha produktif diluar usaha pertanian, baik itu merupakan mata pencaharian utama maupun sampingan (Tambunan, 2001).

Kekuatan yang dimiliki oleh industri kecil (Tambunan, 2001) adalah sebagai berikut :

1. Sangat padat karya dan persediaan tenaga kerja di Indonesia masih sangat banyak, mengikuti laju pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja yang rata rata pertahun sangat tinggi, sehingga upah minimum tenaga kerja khususnya dari kelompok berpendidikan rendah di Indonesia masih relatif murah dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia dengan jumlah penduduk atau angkatan kerja yang lebih sedikit.
2. Industri kecil di Indonesia masih lebih banyak membuat produk-produk sederhana yang tidak terlalu membutuhkan pendidikan formal tinggi.
3. Industri kecil di Indonesia masih merupakan industri yang membuat produk-produk yang bernuansa kultural seperti kerajinan dari kayu dan rotan atau ukir-ukiran yang pada dasarnya merupakan keahlian tersendiri dari masyarakat di masing-masing daerah.
4. Kegiatan industri kecil masih sangat *agricultural based* karena mempunyai banyak komoditi-komoditi pertanian yang dapat diolah dalam skala kecil.

5. Pengusaha-pengusaha industri kecil lebih banyak menggantungkan diri pada kemampuan sendiri atau pinjam dari sumber informal untuk modal kerja dana industri.

Kelemahan dari industri kecil yang ada di Indonesia adalah lemahnya daya saing dipasar domestik terhadap barang-barang pada industri besar dan menengah serta produk yang diekspor. Keterbatasan biaya juga termasuk faktor penyebab lemahnya daya saing industri kecil yang ada di negeri kita tersebut (Tambunan, 2001).

Banyak pengertian atau definisi tentang industri kecil dan menengah. Dalam prakteknya antar departemen dan badan pemerintah mempunyai kriteria sendiri-sendiri yang berbeda dalam mendefinisikan industri kecil dan menengah. Menurut BPS, definisi industri kecil adalah perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 5-19 orang. Sedangkan definisi industri menengah adalah perusahaan/usaha industri pengolahan yang mempunyai pekerja 20-99 orang.

Menurut UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka batasan industri kecil dan menengah didefinisikan sebagai berikut :

- a. Industri kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

- b. Industri menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

2.1.5 Unit Usaha

Badan Pusat Statistik mendefinisikan unit usaha adalah unit yang melakukan kegiatan yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga maupun suatu badan dan mempunyai kewenangan yang ditentukan berdasarkan kebenaran lokasi bangunan fisik, dan wilayah operasinya.

Secara umum, pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Menurut Squire (1992), jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap

jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

2.1.6 Nilai Produksi

Menurut Simanjuntak (2001), nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang merupakan hasil akhir dari proses produksi pada suatu unit usaha selanjutnya akan dijual sampai pada tangan konsumen. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung kepada tinggi rendahnya permintaan oleh konsumen. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut.

Sesuai dengan teori maka untuk meningkatkan output diperlukan peningkatan input yang digunakan, input yang dimaksud dalam hal ini adalah tenaga kerja. Jadi, semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka semakin tinggi pula jumlah barang yang diproduksi. Dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap maka nilai produksi juga akan meningkat.

2.1.7 Investasi

Menurut Sukirno (2003), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran atau penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan

perlengkapan produksi untuk menambah kemampuan produksi barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Jadi dalam perspektif makro, investasi adalah tindakan dari sektor perusahaan dalam membeli barang-barang modal dan bukan dalam perspektif individu dalam membeli barang-barang modal. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu didepresiasi.

Penanaman modal ini dapat dibedakan menjadi penanaman modal Badan Usaha Milik Negara, penanaman swasta dan penanaman modal pemerintah umum. Di dalam pembangunan regional, penanaman modal atau investasi memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat.

Dalam perekonomian makro, kenaikan investasi akan meningkatkan permintaan agregat dan pendapatan nasional. Peningkatan dalam permintaan agregat tersebut akan membawa peningkatan pada kapasitas produksi suatu perekonomian yang kemudian akan diikuti oleh pertambahan dalam kebutuhan akan tenaga kerja untuk proses produksi, yang artinya peningkatan dalam kesempatan kerja.

Menurut pendapat Suparmoko (1994), investasi adalah pengeluaran untuk menambah atau mempertahankan persediaan modal (*capital stock*). Persediaan

modal ini diantaranya seperti peralatan, mesin-mesin, pabrik dan persediaan bahan baku yang bisa dipakai untuk proses produksi. Dari beberapa pendapat di atas tentang investasi, maka dapat disimpulkan investasi merupakan suatu pengeluaran sejumlah dana dari investor atau pengusaha guna membiayai kegiatan produksi untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

2.1.8 Upah Minimum

Upah menurut PP No 8/1981 didefinisikan sebagai suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja untuk suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan dan dinyatakan atau dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan atas dasar suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan serta dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dengan pekerja termasuk tunjangan, baik untuk pekerja sendiri maupun untuk keluarganya.

Menurut UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pengertian upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. Dinilai dalam bentuk uang yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundang-undangan, dan dibayarkan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dengan buruh atau pekerja.

Kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya tenaga kerja yang diminta, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya jumlah pengangguran. Demikian pula sebaliknya, dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh

meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan dikatakan bahwa kesempatan kerja mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat upah. Kenaikan tingkat upah yang disertai oleh penambahan tenaga kerja hanya akan terjadi bila suatu perusahaan mampu meningkatkan harga jual barang (Simanjuntak, 2001).

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pekerja di dalam lingkungan usaha atau kerjanya (UU No. 13 Tahun 2003). Karena pemenuhan kebutuhan yang layak di setiap propinsi berbeda-beda, maka disebut Upah Minimum Propinsi.

Menurut Keputusan Menteri No.1 Th. 1999 Pasal 1 ayat 1, Upah Minimum adalah upah bulanan terendah yang terdiri dari upah pokok termasuk tunjangan tetap. Upah ini berlaku bagi mereka yang lajang dan memiliki pengalaman kerja 0-1 tahun, berfungsi sebagai jaring pengaman, ditetapkan melalui Keputusan Gubernur berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengupahan dan berlaku selama 1 tahun berjalan.

Apabila kita merujuk ke Pasal 94 Undang-Undang (UU) no.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, komponen upah terdiri dari upah pokok dan tunjangan tetap, maka besarnya upah pokok sedikit-dikitnya 75 % dari jumlah upah pokok dan tunjangan tetap. Definisi tunjangan tetap disini adalah tunjangan yang pembayarannya dilakukan secara teratur dan tidak dikaitkan dengan kehadiran atau pencapaian prestasi kerja contohnya tunjangan jabatan, tunjangan komunikasi, tunjangan keluarga, tunjangan keahlian/profesi. Beda halnya dengan tunjangan

makan dan transportasi, tunjangan itu bersifat tidak tetap karena penghitungannya berdasarkan kehadiran atau performa kerja.

Ananta (1990) menjelaskan bahwa secara empiris ada tiga komponen yang dianggap mempengaruhi besarnya upah minimum, yaitu :

a. Kebutuhan Fisik Minimum

Adalah kebutuhan pokok seseorang yang diperlukan untuk mempertahankan kondisi fisik dan mentalnya agar dapat menjalankan fungsinya sebagai salah satu faktor produksi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang minimum baik ditinjau dari segi jumlah maupun dari segi mutu barang dan jasa yang dibutuhkan, sehingga merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari atau dikurangi lagi seperti makan, minum, bahan bakar, perumahan, pakaian, dll.

b. Indeks Harga Konsumen

Merupakan petunjuk mengenai naik turunnya harga kebutuhan hidup. Naiknya harga kebutuhan hidup ini secara tidak langsung mencerminkan tingkat inflasi. Data IHK mencakup 160 macam barang yang dibagi menjadi empat kelompok pengeluaran, yaitu makanan, sandang, perumahan dan aneka.

c. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah mencerminkan keadaan perekonomian di suatu daerah. Keadaan perekonomian ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan kondisi perusahaan yang beroperasi di daerah yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan perekonomian di suatu daerah, maka semakin besar pula kesempatan berkembang bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut.

2.1.9 Hubungan Antar Variabel

Bagian ini menjelaskan tentang teori dan hubungan antara variabel independen (unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, dan upah minimum) terhadap variabel dependen (penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Jawa Tengah tahun 1994-2013).

2.1.9.1 Hubungan antara Jumlah Unit Usaha dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Pertumbuhan unit usaha suatu sektor dalam hal industri kecil dan menengah pada suatu daerah akan menambah jumlah lapangan pekerjaan. Hal ini berarti permintaan tenaga kerja juga bertambah. Menurut Squire (1992), jumlah unit usaha mempunyai pengaruh yang positif terhadap jumlah tenaga kerja. Artinya, jika jumlah unit usaha bertambah maka jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh unit usaha yang bersangkutan akan bertambah pula. Semakin banyak jumlah perusahaan atau unit usaha yang berdiri maka akan semakin banyak untuk terjadi penambahan tenaga kerja.

Hubungan ini diperkuat oleh Rejekiingsih (2004) yang meneliti tentang peranan industri kecil dalam perekonomian Jawa Tengah dengan kesimpulan bahwa jumlah unit usaha dan output industri kecil di Jawa Tengah periode 1991 – 1997 berpengaruh signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja adalah positif dan elastisitas yang berarti bertambahnya jumlah unit usaha akan menambah jumlah tenaga kerja yang terserap.

2.1.9.2 Hubungan antara Nilai Produksi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Nilai Produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha yang selanjutnya akan dijual sampai pada tangan konsumen. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh pengusaha dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja tersebut. Tinggi rendahnya barang yang diproduksi tergantung kepada tinggi rendahnya permintaan oleh konsumen. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen semakin tinggi jumlah barang yang diproduksi sehingga semakin tinggi pula jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan tersebut (Simanjuntak, 2001).

Sesuai dengan teori bahwa untuk meningkatkan output diperlukan peningkatan input yang digunakan, dalam hal ini adalah tenaga kerja. Sehingga semakin tinggi produktivitas tenaga kerja maka semakin tinggi pula jumlah barang yang diproduksi. Dengan asumsi faktor produksi lainnya tetap maka nilai produksi juga akan meningkat.

2.1.9.3 Hubungan antara Nilai Investasi dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Penanaman modal atau investasi dalam teori ekonomi adalah pengeluaran pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan produksi dengan tujuan untuk mengganti dan terutama menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa yang akan datang (Sukirno, 2003). Dengan kata lain, investasi berarti kegiatan pembelanjaan untuk meningkatkan kapasitas produksi suatu perekonomian dan

untuk meningkatkan kapasitas produksi yang lebih tinggi diperlukan pula modal manusia yang mencukupi.

2.1.9.4 Hubungan antara Upah Minimum dengan Penyerapan Tenaga Kerja

Upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada buruh atau pekerja untuk sesuatu pekerjaan atau jasa yang telah atau dilakukan. Simanjuntak (2001) mengatakan bahwa upah bagi pengusaha dapat dipandang sebagai beban karena semakin besar upah yang dibayarkan kepada karyawan, maka semakin kecil proporsi keuntungan bagi pengusaha.

Menurut Kuncoro (2002), kuantitas tenaga kerja yang diminta akan menurun sebagai akibat dari kenaikan upah. Apabila tingkat upah naik sedangkan harga input lain tetap, berarti harga tenaga kerja relatif lebih mahal dari input lain. Situasi ini mendorong pengusaha untuk mengurangi penggunaan tenaga kerja yang relatif mahal dengan input-input lain yang harga relatifnya lebih murah guna mempertahankan keuntungan yang maksimum.

2.1.10 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka dari penelitian terdahulu dijelaskan secara sistematis tentang hasil-hasil penelitian yang didapat oleh peneliti terdahulu dan berhubungan dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian terdahulu diuraikan pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

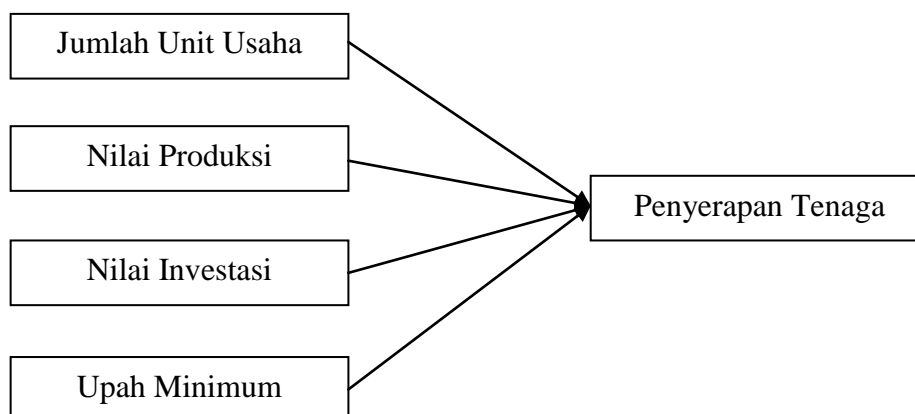
Judul/Penulis/Tahun	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
Analisis Pengaruh Faktor Ekonomi Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada	Data : Data primer dan data sekunder	Modal kerja dan nilai produksi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di Kota

<p>Industri Kecil Tempe di Kota Semarang Penulis : Yanuwardani, Dian dan Nenek Woyanti Tahun : 2009</p>	<p>Variabel : – Variabel dependen : Penyerapan tenaga kerja – Variabel independen : a. Modal Kerja b. Nilai produksi c. Tingkat upah</p> <p>Alat Analisis : <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Semarang. Sedangkan variabel tingkat upah berpengaruh negatif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di Kota Semarang. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil tempe di Kota Semarang adalah variabel modal kerja</p>
<p>Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang Penulis : Setiawan, Achma Hendra Tahun : 2010</p>	<p>Data : Data sekunder berupa <i>time series</i> tahun 1993-2007</p> <p>Variabel : – Variabel dependen : Jumlah tenaga kerja – Variabel independen : a. Jumlah unit usaha b. Nilai investasi c. Nilai output d. UMK</p> <p>Alat Analisis : <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai output tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha</p>
<p>Analisis Pengaruh Upah Minimum dan Inflasi Terhadap Kesempatan Kerja Sektor Industri Pengolahan Besar dan Sedang di Jawa Tengah (35 Kab/Kota) Penulis : Hutagalung, Paul SP dan Purbayu Budi Santosa Tahun : 2013</p>	<p>Data : Data sekunder</p> <p>Variabel : – Variabel dependen : Kesempatan kerja – Variabel independen : a. Upah minimum b. Inflasi</p> <p>Alat analisis : <i>Ordinary Least Square</i> (OLS)</p>	<p>Berdasarkan Uji parsial variabel upah minimum berpengaruh signifikan terhadap kesempatan kerja. Jika upah minimum naik maka kesempatan kerja di kabupaten/kota di Jawa Tengah meningkat. Variabel Inflasi tidak berpengaruh terhadap kesempatan kerja</p>

2.2 Kerangka Pemikiran Teori

Sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah mempunyai kecenderungan meningkat dalam kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi dalam perhitungan PDRB. Dilain pihak, peningkatan kontribusi tersebut dalam kenyataannya tidak diikuti oleh peningkatan permintaan tenaga kerja yang cenderung fluktuatif, bahkan laju pertumbuhannya negatif pada beberapa tahun. Berdasarkan kajian studi pustaka dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teoritis yaitu variabel independen antara lain jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi dan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja sebagai variabel dependen. Untuk memperjelas penelitian ini, dapat dilihat dalam bentuk skema pada Gambar 2.4.

Gambar 2.4
Model Kerangka Pemikiran



Sumber : Setiawan, Achma Hendra (2010)

2.3 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara atau kesimpulan yang diambil untuk menjawab permasalahan yang diajukan dalam suatu penelitian yang sebenarnya

masih harus diuji secara empiris. Hipotesis yang dimaksud merupakan dugaan yang mungkin benar atau salah. Berdasarkan landasan teori, maka hipotesis dari penelitian ini adalah :

1. Diduga ada pengaruh positif dari jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
2. Diduga ada pengaruh positif dari nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
3. Diduga ada pengaruh positif dari nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.
4. Diduga ada pengaruh negatif dari Upah Minimum Provinsi (UMP) terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas adalah suatu variabel yang ada atau terjadi mendahului variabel terikat. Keberadaan variabel ini dalam penelitian kuantitatif merupakan variabel yang menjelaskan terjadinya fokus pada topik penelitian. Sementara itu, maksud dari variabel terikat adalah variabel yang diakibatkan atau yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah penyerapan tenaga kerja, sedangkan variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah unit usaha, nilai produksi, nilai investasi, dan UMP. Definisi operasional untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

1. Penyerapan Tenaga Kerja (Y)

Penyerapan tenaga kerja yang dimaksud merupakan jumlah tenaga kerja yang bekerja pada Industri kecil dan Menengah di Provinsi Jawa Tengah setiap tahun selama tahun 1994-2013 yang dinyatakan dalam satuan orang.

2. Jumlah Unit Usaha (X_1)

Jumlah Usaha khususnya pada industri kecil menengah adalah jumlah dari suatu unit kesatuan usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu dan mempunyai catatan administrasi mengenai produksi dan struktur

biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut, diukur dalam jumlah perusahaan per tahun selama tahun 1994-2013. Variabel ini dalam satuan unit.

3. Nilai Produksi (X_2)

Nilai produksi adalah nilai dari keseluruhan barang dan jasa yang merupakan hasil akhir proses produksi pada suatu unit usaha industri kecil dan menengah selama satu tahun di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1994-2013 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah.

4. Nilai Investasi (X_3)

Nilai Investasi adalah satuan nilai pembelian pengusaha atas barang-barang modal (mesin dan peralatan) dan pembelanjaan untuk persediaan industri kecil dan menengah selama satu tahun di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1994-2013 yang diukur dalam satuan jutaan rupiah

5. Upah Minimum Provinsi (X_4)

Upah Minimum adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya di suatu daerah pada suatu tahun tertentu. Upah dalam penelitian ini sebagai ukuran adalah Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1994-2013. Variabel ini dalam satuan rupiah per tahun.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, seperti mengutip dari buku-

buku, literatur, bacaan ilmiah, jurnal dan sebagainya yang mempunyai relevansi dengan tema penelitian. Data sekunder ini berbentuk data runtut waktu (time series). Data yang dipilih adalah data pada kurun waktu tahun 1994 sampai 2013 dalam bentuk tahunan.

Data-data yang dimaksud adalah data jumlah tenaga kerja Industri kecil menengah di Provinsi Jawa Tengah, jumlah unit usaha industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah, nilai produksi industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah, nilai investasi industri kecil dan menengah di Provinsi Jawa Tengah, serta data UMP Provinsi Jawa Tengah. Data yang akan digunakan dalam penelitian ini bersumber dari BPS Provinsi Jawa Tengah.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka yaitu upaya untuk memperoleh data dengan mempelajari dan menganalisis buku-buku literatur dan data-data olahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan bahan-bahan yang relevan dan akurat. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan metode pengumpulan data studi secara dokumen yang berasal dari BPS Provinsi Jawa Tengah, serta sumber-sumber kepustakaan lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menaksir dan atau meramalkan nilai rata-rata hitung atau nilai rata-rata variabel dependen atas dasar nilai tetap variabel yang

dijelaskan (Gujarati, 2004). Persamaan regresi linier berganda dapat dituliskan sebagai berikut (Gujarati, 2004) :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu \dots\dots\dots (3.1)$$

Persamaan (3.1) ditransformasikan ke dalam bentuk *first difference*. Model regresi diferensial mengurangi tingkat keparahan multikolinearitas karena, walaupun pada level X_2 dan X_3 mungkin sangat berkolinear, tidak ada alasan yang diduga sebelumnya untuk mempercayai bahwa bentuk diferensial mereka juga berkolinear dengan kuat (Gujarati, 2004). Sehingga, variabel bebas dan variabel terikat harus dikurangkan dengan nilai satu periode sebelumnya (t-1).

$$Y_{t-1} = \beta_0 + \beta_1 X_{1t-1} + \beta_2 X_{2t-1} + \beta_3 X_{3t-1} + \beta_4 X_{4t-1} + \mu_{t-1} \dots\dots\dots (3.2)$$

Persamaan (3.1) dikurangi dengan persamaan (3.2) sehingga menjadi :

$$Y - Y_{t-1} = \beta_1 (X_1 - X_{1t-1}) + \beta_2 (X_2 - X_{2t-1}) + \beta_3 (X_3 - X_{3t-1}) + \beta_4 (X_4 - X_{4t-1}) + v_t \quad (3.3)$$

atau

$$\Delta Y = \beta_1 \Delta X_1 + \beta_2 \Delta X_2 + \beta_3 \Delta X_3 + \beta_4 \Delta X_4 + v_t \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana :

Y : Penyerapan tenaga kerja pada IKM (jiwa)

X_1 : Jumlah unit usaha pada IKM (unit)

X_2 : Nilai produksi pada IKM (juta rupiah)

X_3 : Nilai investasi pada IKM (juta rupiah)

X_4 : UMP di Provinsi Jawa Tengah (rupiah)

$\beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4$: Koefisien regresi berganda

v_t : *disturbance error*.

Δ : perubahan nilai

3.4.1 Deteksi Asumsi Klasik

Menurut Gujarati (2004), sebuah model penelitian secara teoritis akan menghasilkan nilai parameter penduga yang tepat bila memenuhi deteksi asumsi klasik dalam regresi, yaitu meliputi deteksi normalitas, deteksi multikolinearitas, deteksi heteroskedastisitas, dan deteksi autokorelasi.

3.4.1.1 Deteksi Normalitas

Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal atau paling tidak mendekati distribusi normal. Model regresi yang paling baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal.

Deteksi asumsi klasik normalitas mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas dari gangguan μ_1 memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2004).

Deteksi normalitas dapat diuji dengan menggunakan uji statistik non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis :

H_0 : data residual berdistribusi normal

H_1 : data residual tidak berdistribusi normal

3.4.1.2 Deteksi Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Untuk menguji ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat digunakan Uji *Glejser*. Uji *Glejser* mengusulkan untuk meregres nilai absolute residual terhadap variable independen (Gujarati, 2004)

3.4.1.3 Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi dimana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti diantara variabel independen (Gujarati, 2004). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Deteksi multikolinearitas ini bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas saling berhubungan secara linier dalam model persamaan regresi yang digunakan. Apabila terjadi multikolinearitas, akibatnya variabel penaksiran menjadi cenderung terlalu besar, t-hitung tidak bias, namun tidak efisien.

Dalam penelitian ini deteksi multikolinearitas akan dilakukan dengan memperhatikan nilai matriks korelasi yang dihasilkan pada saat pengolahan data serta nilai VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*-nya. Nilai dari VIF yang kurang dari 10 dan tolerance yang lebih dari 0,10 maka menandakan bahwa

tidak terjadi adanya gejala multikolinearitas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tersebut tidak terdapat problem multikolinieritas.

3.4.1.4 Deteksi Autokorelasi

Faktor-faktor yang menyebabkan autokorelasi antara lain kesalahan dalam menentukan model, penggunaan lag pada model, memasukkan variabel yang penting. Akibat dari adanya autokorelasi adalah parameter yang diestimasi menjadi bias dan variannya minimum, sehingga tidak efisien (Gujarati, 2004). Untuk menguji ada tidaknya autokorelasi salah satunya diketahui dengan melakukan Uji *Breusch-Godfrey Test* atau Uji *Langrange Multiplier* (LM). Dari hasil uji LM apabila nilai X^2 hitung lebih besar dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 < 5\%$ menegaskan bahwa model mengandung masalah autokorelasi. Demikian juga sebaliknya, apabila nilai X^2 hitung lebih kecil dari nilai X^2 tabel dengan *probability* $X^2 > 5\%$ menegaskan bahwa model terbebas dari masalah autokorelasi.

3.4.2 Uji Statistik

Uji Statistik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2), Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F), Uji dan Uji Koefisien Regresi Parsial (Uji-t).

3.4.2.1 Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui sampai seberapa besar persentase variasi dalam variabel terikat pada model yang diterangkan oleh variabel bebasnya (Gujarati, 2004). Dimana apabila nilai R^2 mendekati 1 maka

ada hubungan yang kuat dan erat antara variabel terikat dan variabel bebas dan penggunaan model tersebut dibenarkan. Sedangkan menurut Gujarati (2004) koefisien determinasi adalah untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan variabel bebas terhadap variabel tidak bebas yang dapat dinyatakan dalam persentase. Namun tidak dapat dipungkiri ada kalanya dalam penggunaan koefisien determinasi (R^2) terjadi bias terhadap satu variabel bebas yang dimasukkan dalam model. Sebagai ukuran kesesuaian garis regresi dengan sebaran data, R^2 menghadapi masalah karena tidak memperhitungkan derajat bebas. Sebagai alternatif digunakan *corrected* atau *adjusted R^2* yang dirumuskan :

$$AdjR^2 = 1 - (1 - R^2) \left(\frac{n-1}{n-k} \right) \dots\dots\dots (3.2)$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

k : Jumlah variabel independen

n : Jumlah sampel

3.4.2.2 Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Uji F pada dasarnya dimaksudkan untuk membuktikan secara statistik bahwa seluruh variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen atau terikat. Hipotesis yang menunjukkan apakah semua variabel bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel tak bebas. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

a. $H_0 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$

Variabel independen unit usaha (X_1), nilai produksi (X_2), nilai investasi (X_3), dan UMP (X_4) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y).

b. $H_1 : \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 > 0$

Variabel independen unit usaha (X_1), nilai produksi (X_2), nilai investasi (X_3), dan UMP (X_4) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel penyerapan tenaga kerja (Y).

Nilai F hitung dapat diperoleh dengan rumus (Gujarati, 2004)

$$F = \frac{R^2 / (k-1)}{(1-R^2) / (N-k)} \dots\dots\dots (3.3)$$

Dimana:

R^2 : Koefisien determinasi

N : Jumlah observasi

k : Jumlah parameter

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut :

a. Apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima

b. Apabila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak

3.4.2.3 Koefisien Regresi Parsial (Uji-t)

Uji statistik t untuk menunjukkan apakah masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Perumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut :

1. Variabel Unit Usaha (X_1)

$H_0 : \beta_1 = 0$, tidak ada pengaruh antara unit usaha (X_1) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

$H_1 : \beta_1 > 0$, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara unit usaha (X_1) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

2. Variabel Nilai Produksi (X_2)

$H_0 : \beta_2 = 0$, tidak ada pengaruh antara nilai produksi (X_2) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

$H_1 : \beta_2 > 0$, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai produksi (X_2) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

3. Variabel Nilai Investasi (X_3)

$H_0 : \beta_3 = 0$, tidak ada pengaruh antara nilai investasi (X_3) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

$H_1 : \beta_3 > 0$, ada pengaruh yang positif dan signifikan antara nilai investasi (X_3) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

4. Variabel UMP (X_4)

$H_0 : \beta_4 = 0$, tidak ada pengaruh antara nilai produksi (X_4) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

$H_1 : \beta_4 < 0$, ada pengaruh yang negatif dan signifikan antara nilai produksi (X_4) secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja (Y)

Dalam pengujian hipotesis dengan uji-t digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta_i}{Se(\beta_i)} \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana :

β_i : koefisien regresi

$Se(\beta_i)$: *Standart error* koefisien regresi

sedangkan kriteria pengujiannya adalah sebagai berikut:

- a. Apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima.
- b. Apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$, maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.